

# **Petunjuk Teknis E-Monev Generasi III Versi 3.0 Modul K6**

Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta  
Pelaporannya



Direktorat  
SPPEPP



Berita



Aktivitas Asistensi E-monev 2017



Galeri



Jadwal  
Kegiatan



Panduan  
Pengguna



Daftar K/L



Kontak



Login  
E-monev

## **Petunjuk Teknis E-Monev Generasi III Versi 3.0 Modul K6**

Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Pelaporannya

Disusun oleh :

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Diterbitkan oleh

Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Edisi pertama : Agustus 2018

Alamat Kontak

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Jalan Taman Sunda Kelapa No.9

Jakarta Pusat 10310

Telp/fax 021 31927438

email [spekp@bappenas.go.id](mailto:spekp@bappenas.go.id)

# Daftar isi

|  |    |
|--|----|
| Daftar isi   | i  |
| Bab 1. Menu Beranda  | 1  |
| 1.1. Langkah 1 : Pengaksesan Aplikasi  | 2  |
| 1.2. Langkah 2 : Login   | 3  |
| 1.3. Langkah 3 : Memasuki Beranda Mula   | 4  |
| Bab 2. Menu Pemantauan   | 5  |
| 2.1. Langkah 1 : Pilih Menu Pemantauan   | 6  |
| 2.2. Langkah 2 : Pilih Submenu Satker (Provinsi dan Kabupaten/Kota)              | 8  |
| 2.3. Langkah 3 : Pilih Submenu OPD (Provinsi dan Kabupaten/Kota)                 | 10 |
| 2.4. Langkah 4 : Pilih Submenu Kabupaten/Kota (Hanya Bappeda Provinsi)           | 11 |
| 2.5. Langkah 5 : Pilih Submenu Kementerian/Lembaga (Provinsi dan Kabupaten/Kota) | 13 |
| 2.6. Langkah 6 : Pilih Submenu Jenis Kewenangan (Provinsi dan Kabupaten/Kota)    | 14 |
| Bab 3. Penutup   | 15 |
| 3.1. Catatan   | 16 |
| 3.2. Penutup   | 17 |



## Bab 1

# Menu Beranda



## 1.1. Langkah 1 : Pengaksesan Aplikasi

Aplikasi e-Monev PP 39 tahun 2006 dapat diakses di alamat **e-monev.bappenas.go.id** dengan tampilan halaman depan sebagai berikut:



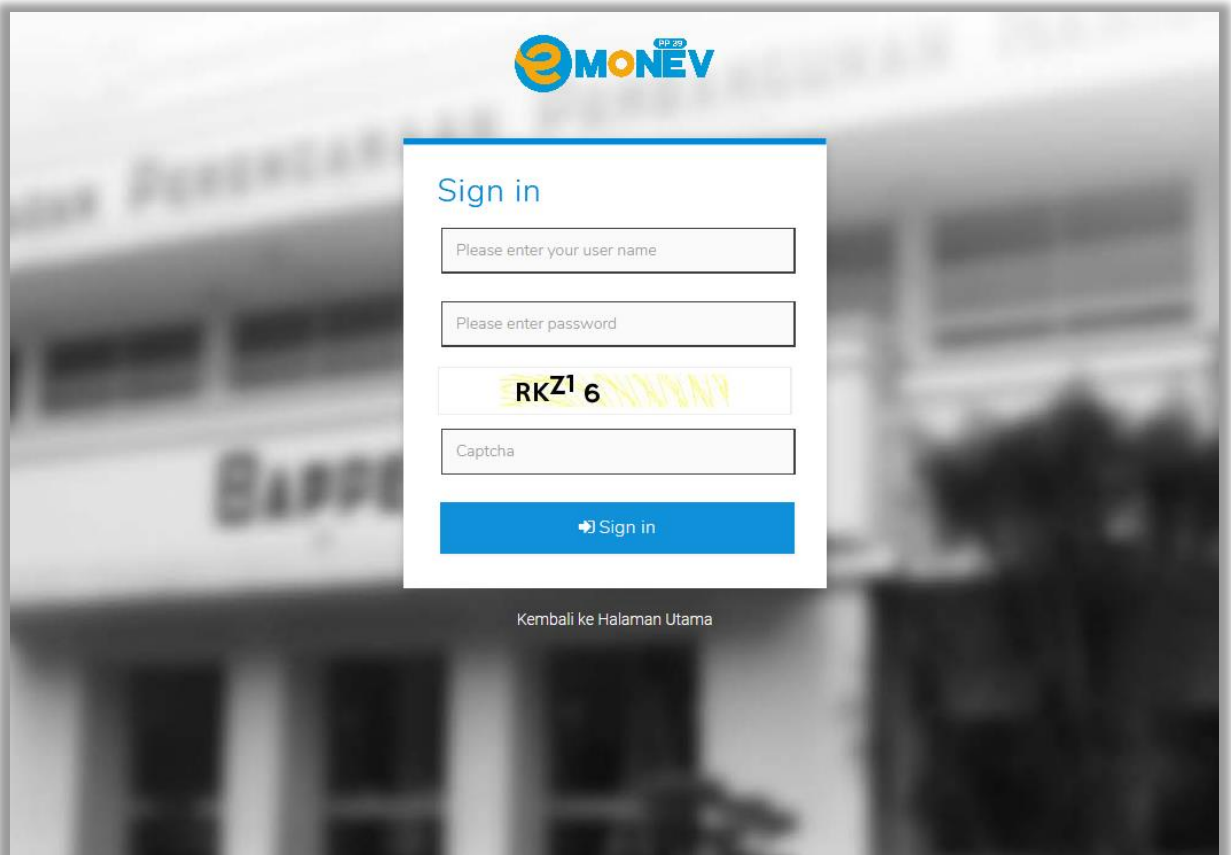
### Informasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) adalah Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi pemantauan dan pelaporan pemantauan pelaksanaan Renja-KL yang berbasis PP 39/2006.
- Pemantauan merupakan salah satu fungsi yang diatur dalam PP 39/2006 yang memandatkan pemantauan pelaksanaan Renja-KL dan pelaporannya oleh seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pelaksana Renja-KL baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

## 1.2. Langkah 2 : Login

Pengguna K6 (User K6) dapat login dengan cara mengklik tombol “login” dihalaman depan menggunakan username dan password sebagai berikut :

Username : K6\_bappeda\_provkabKota  
Password : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Sign in

Please enter your user name

Please enter password

RKZ1 6

Captcha

Sign in

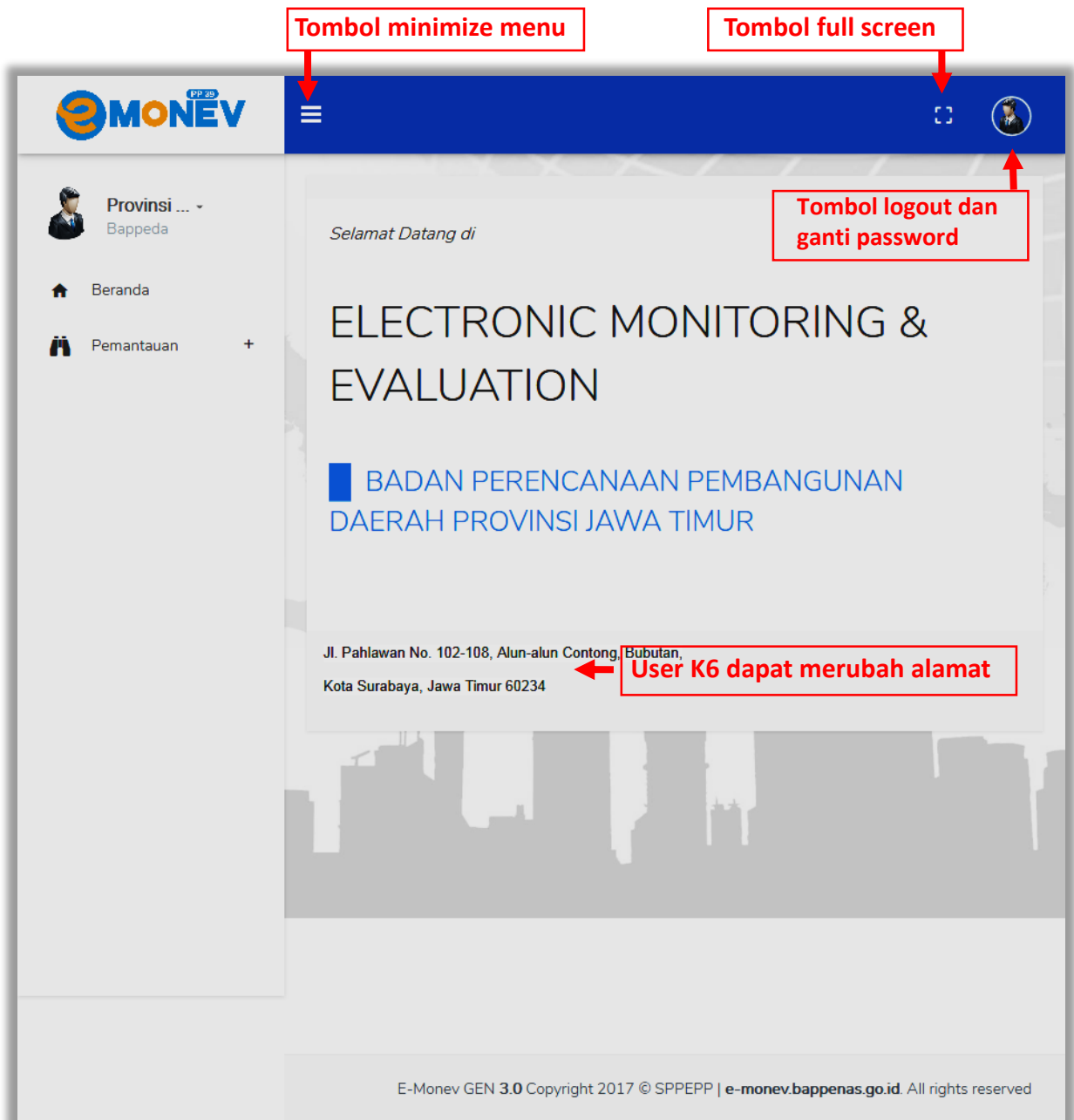
Kembali ke Halaman Utama

### Informasi

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.
- Sesuai dengan PP 39/2006, Bappeda memantau dan melaporkan pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama yang ada di wilayahnya.
- Bappenas, dalam hal ini Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kedeputan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan memberikan list username dan password User K6 kepada masing-masing Bappeda.

### 1.3. Langkah 3 : Memasuki Beranda Mula

Ini adalah halaman Beranda User K6 dengan tiga menu, yaitu **Beranda**, dan **Pemantauan**. Pada halaman Beranda ini User K6 dapat melakukan perubahan password dan perubahan alamat Satker yang bersangkutan.





## Bab 2

# Menu Pemantauan



## **2.1. Langkah 1 : Pilih Menu Pemantauan**

Pemantauan adalah menu utama pada aplikasi ini. Bappeda (User K6) dalam hal ini bertindak selaku pengguna data hasil pemantauan.

User K6 dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota. Secara garis besar, perbedaan antara modul K6 Bappeda Provinsi dan Modul K6 Bappeda Kabupaten/Kota ada pada menu Kabupaten/Kota. Bappeda Provinsi dapat melihat dan memantau pelaksanaan Renja-KL di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi tersebut. (kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama serta pelaksanaan desentralisasi)

Informasi yang terdapat dalam akses User K6 ini adalah data hasil pemantauan (data realisasi pelaksanaan) yang dilakukan oleh satker-satker pelaksana Renja-KL di wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan data realisasi pelaksanaan ini, Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menyusun laporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh PP 39/2006, khususnya pasal 6 dan pasal 8.

Untuk memantau pelaksanaan Renja-KL di wilayahnya, Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengklik menu pemantauan.

### **Menu Pemantauan untuk Bappeda**

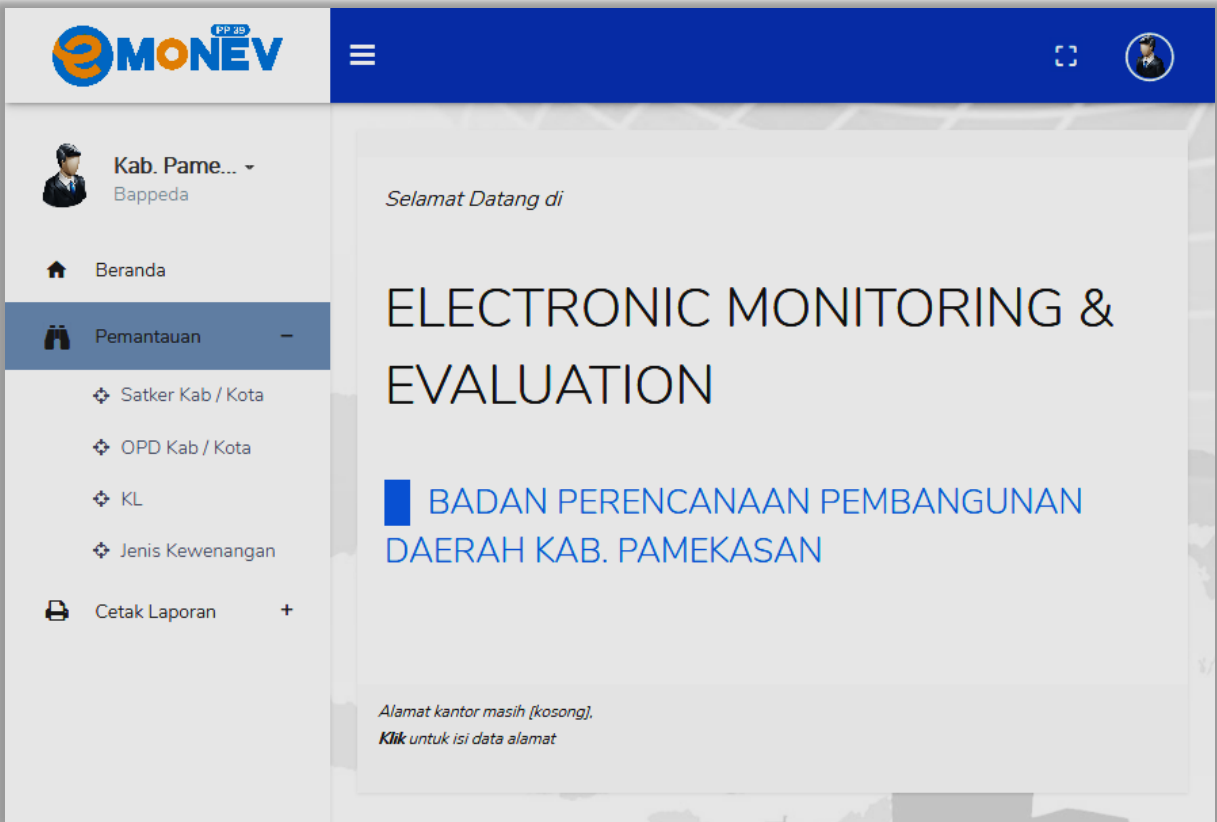
Menu pemantauan bagi Bappeda Provinsi terdiri dari submenu Satker Provinsi, OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, KL (Kementerian/Lembaga), dan Jenis kewenangan.

Sementara itu, untuk Bappeda/Kota, menu pemantuan terdiri dari submenu Satker Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota, KL (Kementerian/ Lembaga), dan Jenis kewenangan.

Menu pemantauan User K6, Bappeda Provinsi :



Menu Pemantauan User K6, Bappeda Kabupaten/Kota :



## 2.2. Langkah 2 : Pilih Submenu Satker (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau pelaksanaan dari satker-satker yang ada di wilayahnya. Sebagai informasi, Bappeda Provinsi pada submenu satker ini hanya dapat melihat pelaksanaan dari satker yang hanya ada di wilayah Provinsi (kode 00). User K6 Bappeda Provinsi dapat melihat pelaksanaan satker dari seluruh Kabupaten/Kota di submenu Kabupaten/Kota.

Untuk melihat data realisasi dan memantau pelaksanaan satker, User K6 Bappeda Provinsi dapat mengklik submenu Satker Provinsi, sementara User K6 Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengklik submenu Satker Kab/Kota.

| INFORMASI                          |        |   |                           |                             |
|------------------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------------|
| TAHUN ANGGARAN : 2018              |        |   |                           |                             |
| BAPPEDA : [05.06] - KAB. PAMEKASAN |        |   |                           |                             |
| SATUAN KERJA                       |        |   |                           |                             |
| NO                                 | KODE   | NAMA SATKER   | ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH) | REALISASI ANGGARAN (RUPIAH) |
| 1                                  | 019632 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PAMEKASAN                  | 4,114,125,000             | 1,753,212,110               |
| 2                                  | 405251 | BALAI PEMASYARAKATAN PAMEKASAN                        | 3,362,176,000             | 0                           |
| 3                                  | 350112 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PAMEKASAN | 0                         | 0                           |
| 4                                  | 059490 | DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN                   | 4,029,000,000             | 0                           |
| 5                                  | 683458 | KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN                   | 3,530,289,000             | 0                           |
| 6                                  | 298291 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN               | 0                         | 0                           |
| 7                                  | 299173 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN               | 6,492,197,000             | 1,439,736,508               |
| 8                                  | 299174 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN               | 0                         | 0                           |
| 9                                  | 299175 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN               | 0                         | 0                           |
| 10                                 | 506282 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAMEKASAN | 4,201,679,000             | 1,812,718,194               |
| 11                                 | 548954 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAMEKASAN              | 123,150,000               | 62,627,700                  |
| 12                                 | 527471 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN      | 2,142,257,000             | 340,257,757                 |

User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut satker di wilayahnya hingga level komponen (input). Untuk melihat realisasi komponen, User K6 harus melewati empat halaman yaitu halaman Satuan Kerja (Satker), halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan, dan halaman Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur Satker, Kegiatan, Output Kegiatan, dan Suboutput Kegiatan.

Sebagai informasi, pada masing-masing halaman tersedia pula informasi alokasi anggaran dan realisasi anggaran. Selain itu pada semua halaman pemantauan terdapat dua panel informasi yakni data referensi (panel bagian atas) dan data realisasi (panel bagian bawah). Pada halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan, dan halaman Komponen, User K6 dapat menggunakan (membandingkan) data referensi dan data realisasi untuk melihat perkembangan dari pelaksanaan komponen, output, dan kegiatan.

Pada halaman komponen, User K6 dapat melihat Pada halaman komponen ini, data realisasi ditampilkan untuk 12 bulan. User K6 dapat melihat progress pelaksanaan dengan membandingkan data output (nomenklatur output dan volume) di panel referensi (panel atas) dengan data realisasi komponen di panel bawah.

2. PEMANTAUAN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

BAPPEDA : [05.06] - K4B. P4MEKASAW

SATUAN KERJA : [521349] - UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BRANTA

ANGGARAN SATKER : Rp. 8.300.518.000.00

KEMENTERIAN / LEMBAGA : [022] - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA ESELON I : [022.04] - Ditjen Perhubungan Laut

PROGRAM : [022.04.08] - Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

UNIT KERJA ESELON II : [04] - Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

KEGIATAN : [1957] - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

OUTPUT : [1957.001] - Layanan Kepelabuhanan

- VOLUME : 329 Paket

- ALOKASI ANGGARAN : Rp. 1.689.047.247.000.00

KOMPONEN

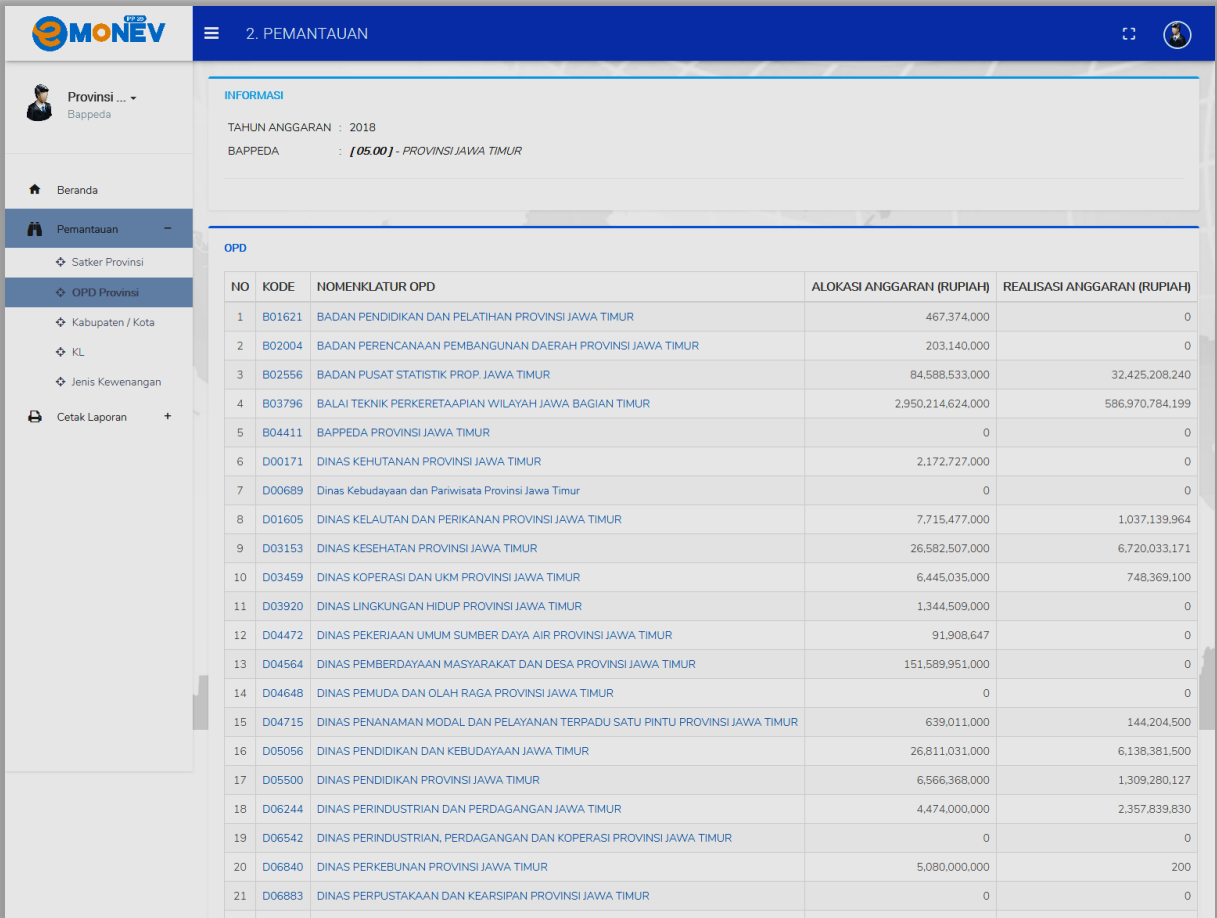
| No | Kode & Nama<br>(Komponen)                           | Jenis | Vol | Satuan | Alokasi Anggaran | Anggaran  |         |           |         | Fisik    |            | Kinerja Total |                           | Status Pelaksanaan        |              | Permasalahan        |  |
|----|---|-------|-----|--------|------------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--|
|    |   |       |     |        |                  | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | Kategori | Keterangan | Kategori      | Keterangan                | Kategori                  | Keterangan   |                     |  |
| 1  | 1957.001.001.056<br>Pembangunan Gedung dan Bangunan | utama | 1   | Paket  | 2.446,811.000    | 0         | 0.00 %  | 0.00      | 0.00 %  | 0.00 %   | 0.00 %     | Perencanaan   | Desain perencanaan/konsep | Desain perencanaan/konsep | Permasalahan | BELUM MULAI KONTRAK |  |

E-Monev GEN 3.0 Copyright 2017 © SPPEPP | e-money.bappenas.go.id All rights reserved

### 2.3. Langkah 3 : Pilih Submenu OPD (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut satker pelaksana Renja-KL yang ada di OPD tersebut. Sebagai informasi, Bappeda Provinsi pada submenu OPD ini hanya dapat melihat data realisasi dari OPD Provinsi saja. Apabila User K6 Bappeda Provinsi ingin melihat pelaksanaan Renja-KL di Kabupaten/Kota dapat melihat data realisasi Satker di submenu Kabupaten/Kota.

Untuk melihat data realisasi dan memantau OPD, User K6 Bappeda Provinsi dapat mengklik submenu OPD Provinsi, sementara User K6 Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengklik submenu OPD Kab/Kota.



The screenshot shows the MoNEV application interface. The sidebar on the left contains the MoNEV logo, a user profile for 'Provinsi ... Bappeda', and navigation links: Beranda, Pemantauan (selected), Satker Provinsi, OPD Provinsi (selected), Kabupaten / Kota, KL, Jenis Kewenangan, and Cetak Laporan. The main content area is titled '2. PEMANTAUAN' and includes an 'INFORMASI' section with 'TAHUN ANGGARAN : 2018' and 'BAPPEDA : [05.00] - PROVINSI JAWA TIMUR'. Below this is a table titled 'OPD' with columns: NO, KODE, NOMENKLATUR OPD, ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH), and REALISASI ANGGARAN (RUPIAH). The table lists 21 rows of data for various OPDs in Jawa Timur.


| NO | KODE   | NOMENKLATUR OPD  | ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH) | REALISASI ANGGARAN (RUPIAH) |
|----|--------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | B01621 | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR                         | 467,374,000               | 0                           |
| 2  | B02004 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR                   | 203,140,000               | 0                           |
| 3  | B02556 | BADAN PUSAT STATISTIK PROP. JAWA TIMUR                                     | 84,588,533,000            | 32,425,208,240              |
| 4  | B03796 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR                      | 2,950,214,624,000         | 586,970,784,199             |
| 5  | B04411 | BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR  | 0                         | 0                           |
| 6  | D00171 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR  | 2,172,727,000             | 0                           |
| 7  | D00689 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur                        | 0                         | 0                           |
| 8  | D01605 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR                           | 7,715,477,000             | 1,037,139,964               |
| 9  | D03153 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  | 26,582,507,000            | 6,720,033,171               |
| 10 | D03459 | DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR                                 | 6,445,035,000             | 748,369,100                 |
| 11 | D03920 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR                                 | 1,344,509,000             | 0                           |
| 12 | D04472 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR                   | 91,908,647                | 0                           |
| 13 | D04564 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR                 | 151,589,951,000           | 0                           |
| 14 | D04648 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA TIMUR                             | 0                         | 0                           |
| 15 | D04715 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR | 639,011,000               | 144,204,500                 |
| 16 | D05056 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR                                 | 26,811,031,000            | 6,138,381,500               |
| 17 | D05500 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR                                       | 6,566,368,000             | 1,309,280,127               |
| 18 | D06244 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR                             | 4,474,000,000             | 2,357,839,830               |
| 19 | D06542 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI JAWA TIMUR          | 0                         | 0                           |
| 20 | D06840 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR                                       | 5,080,000,000             | 200                         |
| 21 | D06883 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR                       | 0                         | 0                           |


User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut OPD di wilayahnya hingga level komponen. Untuk melihat realisasi komponen, User K6 harus melewati lima halaman yaitu halaman OPD, halaman Satuan Kerja (Satker), halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan, dan halaman Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur OPD, Satker, Kegiatan, Output Kegiatan, dan Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.


## 2.4. Langkah 4 : Pilih Submenu Kabupaten/Kota (Hanya Bappeda Provinsi)

User K6 Bappeda memantau pelaksanaan Renja-KL di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut. Untuk melihat data realisasi dan memantau pelaksanaan Renja-KL menurut Kabupaten/Kota, User K6 Bappeda Provinsi dapat mengklik submenu Kabupaten/Kota.












2. PEMANTAUAN



Provinsi ...  
Bappeda

 Beranda

 Pemantauan

-  Satker Provinsi
-  OPD Provinsi
-  Kabupaten / Kota
-  KL
-  Jenis Kewenangan

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

BAPPEDA : [05.00] - PROVINSI JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA

| NO | KODE  | NAMA KABUPATEN / KOTA | TOTAL SATKER | ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH) | REALISASI ANGGARAN (RUPIAH) |
|----|-------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | 05.01 | Kab. Gresik           | 29 Satker    | 153,562,969,000           | 34,143,738,168              |
| 2  | 05.02 | Kab. Mojokerto        | 21 Satker    | 230,101,042,656           | 77,060,173,059              |
| 3  | 05.03 | Kab. Sidoarjo         | 48 Satker    | 695,203,327,000           | 196,331,263,973             |
| 4  | 05.04 | Kab. Jombang          | 46 Satker    | 422,866,401,000           | 82,158,782,557              |
| 5  | 05.05 | Kab. Sampang          | 21 Satker    | 119,991,752,000           | 19,418,180,285              |
| 6  | 05.06 | Kab. Pamekasan        | 35 Satker    | 249,660,288,000           | 43,988,815,271              |
| 7  | 05.07 | Kab. Sumenep          | 30 Satker    | 248,107,787,008           | 89,452,183,422              |
| 8  | 05.08 | Kab. Bangkalan        | 20 Satker    | 125,911,845,000           | 11,834,037,977              |
| 9  | 05.09 | Kab. Bondowoso        | 24 Satker    | 183,840,255,000           | 9,683,203,874               |
| 10 | 05.10 | Kab. Situbondo        | 23 Satker    | 190,821,193,350           | 33,042,507,198.369          |
| 11 | 05.11 | Kab. Banyuwangi       | 48 Satker    | 503,207,498,000           | 178,674,002,086             |
| 12 | 05.12 | Kab. Jember           | 45 Satker    | 1,203,673,455,000         | 64,123,584,807              |
| 13 | 05.13 | Kab. Malang           | 42 Satker    | 730,612,059,000           | 163,620,168,581             |
| 14 | 05.14 | Kab. Pasuruan         | 33 Satker    | 137,020,349,000           | 31,774,432,229              |
| 15 | 05.15 | Kab. Probolinggo      | 27 Satker    | 204,244,423,850           | 27,888,841,989              |
| 16 | 05.16 | Kab. Lumajang         | 23 Satker    | 113,248,134,000           | 26,601,796,749              |
| 17 | 05.17 | Kab. Kediri           | 32 Satker    | 180,256,172,804           | 52,005,224,339              |
| 18 | 05.18 | Kab. Tulungagung      | 34 Satker    | 239,277,739,000           | 31,408,271,085              |
| 19 | 05.19 | Kab. Nganjuk          | 35 Satker    | 100,715,946,000           | 17,592,747,384              |
| 20 | 05.20 | Kab. Trenggalek       | 27 Satker    | 69,328,372,000            | 30,430,202,455              |
| 21 | 05.21 | Kab. Blitar           | 29 Satker    | 185,109,740,493           | 34,627,875,154              |
| 22 | 05.22 | Kab. Madiun           | 35 Satker    | 238,665,850,074           | 58,882,712,416              |
| 23 | 05.23 | Kab. Ngawi            | 30 Satker    | 249,419,460,000           | 87,909,678,836              |
| 24 | 05.24 | Kab. Magetan          | 31 Satker    | 253,179,862,000           | 124,557,351,316             |
| 25 | 05.25 | Kab. Ponorogo         | 27 Satker    | 359,754,547,000           | 135,286,806,459             |
| 26 | 05.26 | Kab. Pacitan          | 22 Satker    | 128,990,475,000           | 47,474,254,706              |
| 27 | 05.27 | Kab. Bojonegoro       | 32 Satker    | 356,981,241,000           | 41,036,874,402              |
| 28 | 05.28 | Kab. Tuban            | 24 Satker    | 623,047,272,500           | 80,812,214,198              |
| 29 | 05.29 | Kab. Lamongan         | 22 Satker    | 311,497,452,006           | 106,402,625,704             |
| 30 | 05.51 | Kota Surabaya         | 211 Satker   | 8,073,244,671,960         | 1,545,650,172,491           |
| 31 | 05.52 | Kota Mojokerto        | 22 Satker    | 302,784,724,706           | 25,074,294,332              |

Selain itu, User K6 Bappeda Provinsi dapat pula melihat jenis kewenangan menurut kabupaten dan kota.

Provinsi ...  
Bappeda

Beranda

Pemantauan

Satker Provinsi

OPD Provinsi

Kabupaten / Kota

KL

Jenis Kewenangan

2. PEMANTAUAN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

BAPPEDA : [05.00] - PROVINSI JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA : [05.51] - KOTA SURABAYA

JENIS KEWENANGAN

| NO    | KODE | NAMA JENIS KEWENANGAN | TOTAL SATKER | ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH) | REALISASI ANGGARAN (RUPIAH) |
|-------|------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1     | KP   | Kantor Pusat          | 25 Satker    | 598,197,144,143           | 139,338,782,063             |
| 2     | KD   | Kantor Daerah         | 183 Satker   | 7,470,997,752,817         | 1,406,186,484,228           |
| 3     | DK   | Dekonsentrasi         | 2 Satker     | 4,049,775,000             | 124,906,200                 |
| 4     | TP   | Tugas Pembantuan      | 1 Satker     | 0                         | 0                           |
| 5     | UB   | Urusan Bersama        | 0 Satker     | 0                         | 0                           |
| 6     | DS   | Desentralisasi        | 0 Satker     | 0                         | 0                           |
| TOTAL |      |                       | 211 Satker   | 8,073,244,671,960.00      | 1,545,650,172,491.00        |

\* Klik untuk lihat detail

User K6 Bappeda Provinsi dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut Kabupaten dan kota di wilayah provinsinya hingga level komponen (input). Untuk melihat realisasi komponen, User K6 Bappeda Provinsi harus melewati enam halaman yaitu halaman Kabupaten/Kota, halaman Jenis Kewenangan, halaman Satuan Kerja (Satker), halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan dan halaman Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur Kabupaten/Kota, Jenis Kewenangan, Satker, Kegiatan, Output Kegiatan dan Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.



2.5. Langkah 5 : Pilih Submenu Kementerian/Lembaga (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau pelaksanaan Renja-KL berdasarkan Kementerian/Lembaga yang mempunyai satker di wilayah Provinsi,Kabupaten, dan Kota.

Untuk melihat data realisasi dan memantau pelaksanaan Renja-KL menurut Kementerian/Lembaga, User K6 Bappeda Provinsi dapat mengklik submenu Kementerian/Lembaga.

Provinsi ...  
Bappeda

Beranda

Pemantauan

Satker Provinsi

OPD Provinsi

Kabupaten / Kota

KL

Jenis Kewenangan

2.4. LAPORAN DIGITAL SATKER/KOMPONEN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

BAPPEDA : [05.00] - BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

KEMENTERIAN / LEMBAGA

| NO | KODE | NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA                   | ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH) | REALISASI ANGGARAN (RUPIAH) |
|----|------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | 010  | KEMENTERIAN DALAM NEGERI                   | 848,642,000               | 0                           |
| 2  | 012  | KEMENTERIAN PERTAHANAN                     | 80,702,231,000            | 0                           |
| 3  | 018  | KEMENTERIAN PERTANIAN                      | 275,624,852,800           | 1,062,265,138               |
| 4  | 019  | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN                  | 4,474,000,000             | 2,357,839,830               |
| 5  | 022  | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN                    | 2,950,214,624,000         | 586,970,784,199             |
| 6  | 023  | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      | 33,377,399,000            | 28,958,554                  |
| 7  | 024  | KEMENTERIAN KESEHATAN                      | 26,582,507,000            | 1,484,858,300               |
| 8  | 026  | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN                | 9,792,576,000             | 828,309,800                 |
| 9  | 027  | KEMENTERIAN SOSIAL                         | 26,972,074,000            | 49,742,000                  |
| 10 | 029  | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 3,517,236,000             | 0                           |

User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut Kementerian/Lembaga yang ada di wilayahnya hingga level komponen (input). Untuk melihat realisasi komponen, User K6 harus melewati enam halaman yaitu halaman Kementerian/Lembaga, halaman Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1), halaman Program, halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan dan halaman Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur Kementerian/Lembaga, Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1), Program, Kegiatan, Output Kegiatan dan Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.

2.6. Langkah 6 : Pilih Submenu Jenis Kewenangan (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau pelaksanaan Renja-KL berdasarkan jenis kewenangan. User K6 Bappeda hanya dapat melihat jenis kewenangan menurut satker yang ada di wilayahnya saja. Bappeda Provinsi hanya bisa melihat untuk lingkup Provinsi, demikian juga untuk Bappeda Kabupaten/Kota.

Sebagai catatan, Bappeda Provinsi dapat melihat jenis kewenangan menurut Kabupaten/Kota yang ada di Provinsinya pada submenu Kabupaten/Kota.

Kab. Pame...  
Bappeda

Beranda

Pemantauan

Satker Kab / Kota

OPD Kab / Kota

KL

Jenis Kewenangan

2. PEMANTAUAN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : [05.06] - BAPPEDA KAB. PAMEKASAN

JENIS KEWENANGAN

| NO    | KODE | NAMA JENIS KEWENANGAN | TOTAL SATKER | ALOKASI ANGGARAN (RUPIAH) | REALISASI ANGGARAN (RUPIAH) |
|-------|------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1     | KP   | Kantor Pusat          | 1 Satker     | 0.00                      | 0.00                        |
| 2     | KD   | Kantor Daerah         | 32 Satker    | 245,631,288,000.00        | 43,988,815,271.00           |
| 3     | DK   | Dekonsentrasi         | 0 Satker     | 0.00                      | 0.00                        |
| 4     | TP   | Tugas Pembantuan      | 1 Satker     | 4,029,000,000.00          | 0.00                        |
| 5     | UB   | Ururan Bersama        | 1 Satker     | 0.00                      | 0.00                        |
| 6     | DS   | Desentralisasi        | 0 Satker     | 0.00                      | 0.00                        |
| TOTAL |      |                       | 35 Satker    | 249,660,288,000.00        | 43,988,815,271.00           |

User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut kabupaten dan kota hingga level komponen (input). Untuk melihat realisasi komponen, User K6 harus melewati lima halaman yaitu halaman Jenis Kewenangan, halaman Satuan Kerja (Satker), halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan dan halaman Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur jenis kewenangan, Satker, Kegiatan, Output Kegiatan, dan Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.

## Bab 3

## Penutup



### **3.1. Catatan**

Sesuai dengan PP 39/2006 dimana Bappeda menyusun laporan triwulan terkait pelaksanaan fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Aplikasi e-Monev mengakomodasi hal tersebut dengan menyediakan data realisasi pelaksanaan, dimana Bappeda dapat menggunakan data tersebut untuk menyusun pelaporan sebagaimana dimaksud.

Data sebagaimana dimaksud terdiri dari data pelaksanaan di level komponen (level input). Perubahan fokus data hingga ke data input mengikuti struktur data Renja-KL yang baru, dengan fokus yang semakin dalam yakni hingga level input (komponen). Sementara untuk data output, tanggung jawab mengenai ketercapaian dan entri datanya di aplikasi e-monev dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II (UKE-2) di Kementerian/Lembaga. Demikian pula untuk capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan.

Data di level komponen ini memegang peranan penting untuk melihat dan memantau intervensi atau bentuk intervensi (program dan kegiatan) yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Renja-KL. Peran Bappeda sangat diharapkan utamanya untuk mendorong satker-satker di wilayah kerjanya untuk melaporkan pelaksanaan Renja-KL nya secara lengkap dan tepat waktu melalui aplikasi e-monev.

### **3.2. Penutup**

Petunjuk Teknis e-Monev Gen III Versi 3.0 Modul K6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman umum Aplikasi E-Monev Gen III versi 3.0. Buku Petunjuk teknis ini hanya memuat tahapan pengentrian data realisasi komponen. Pengguna atau User e-Monev diharapkan dapat menggunakan baik pedoman umum dan petunjuk teknis secara bersama-sama, mengingat perbedaan metode pengukuran di aplikasi ini cukup berbeda dibandingkan dengan metode pengukuran pada e-monev sebelumnya.

Saat ini kami terus menyempurnakan aplikasi e-Monev ini, khususnya untuk menu cetak laporan bagi User K6. Perubahan metode pengukuran dengan pendekatan yang lebih detail, yakni hingga level komponen menyebabkan data tidak bisa serta merta disajikan dalam bentuk rekapitulasi. Data rialisasi yang lebih rinci diharapkan dapat membantu Bappeda mengendalikan proses pembangunan yang ada diwilayahnya

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat membantu unit kerja dan satuan kerja dalam melakukan pengentrian data melalui aplikasi e-Monev. Data dan Informasi hasil pemantauan yang baik dapat bermanfaat tidak saja bagi birokrasi, aparatur penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, namun juga bagi khalayak publik. Kami berharap dapat terus menyempurnakan aplikasi dan informasi yang disajikan, sehingga gambaran pelaksanaan pembangunan dapat kita dapatkan secara lebih utuh dan lengkap.







**Kementerian PPN/  
Bappenas**

Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
2018

